

**ANALISIS KINERJA PEGAWAI BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN PADA SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :
FITRIA AMANDA
07011382126247**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA PEGAWAI BAGIAN FASILITASI
PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PADA SEKRETARIAT
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh :

**FITRIA AMANDA
07011382126247**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 17 Juli 2025

Pembimbing



Junaidi, S.IP., M.SI.
NIP. 197603092008011009

18 Juli 2025

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



Dr. M. Nur Budiyo, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

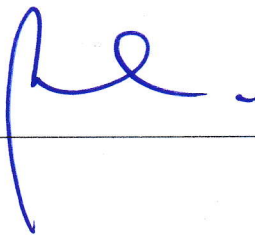
**ANALISIS KINERJA PEGAWAI BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN PADA SEKRETARIAT
DPRD KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada
Tanggal 25 Juli 2025
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

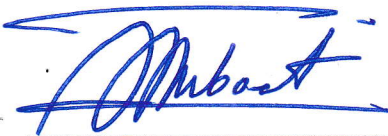
Junaidi, S.IP., M.Si.
Ketua



Drs. Mardianto, M.Si
Anggota



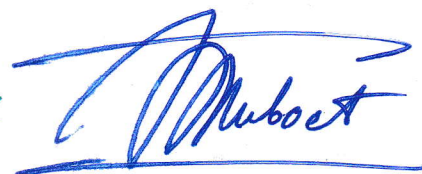
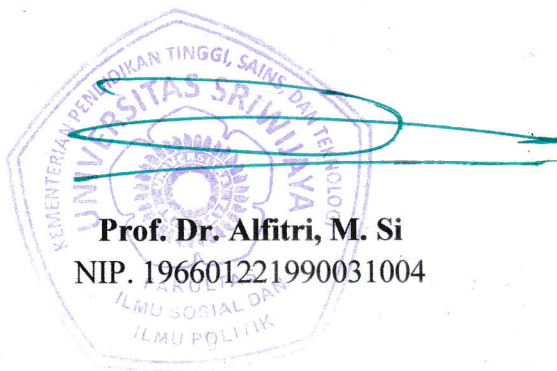
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
Anggota



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Amanda

NIM : 07011382126247

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Pegawai Bagian Fasilitasi Penyelenggaraan Dan Pengawasan Pada Sekretariat Kota Palembang.” ini adalah benar-bener karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, 29 Juni 2025



Fitria Amanda

NIM.07011382126209

MOTTO PERSEMBAHAN

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al-usri yusra, inna ma al-usri yusra.”

- (QS. AL-Insyirah 94, 5-6)

Dengan rahmat Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua Saya, Bapak Septa Indira (ALM) dan Ibu Rita Sari
2. Kakek dan Nenekku tercinta
3. Yusril Trieza Mahendra
4. Adik Adikku tersayang
5. Dosen pembimbing saya, Bapak Junaidi, S.IP., M.Si
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Almamater Tercinta
8. Sahabat dan Teman Seperjuangan
9. Administasi Publik Angkatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai pada Bagian Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengawasan di Sekretariat Kota Palembang. Kinerja pegawai merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teori Schullar & Siusan, 1992, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi, kedisiplinan, motivasi, dan lingkungan kerja. Secara umum, kinerja pegawai sudah berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan penyelesaian tugas dan koordinasi antarunit. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan berkala, peningkatan sistem evaluasi kinerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai secara berkelanjutan.

**Kata Kunci: kinerja pegawai, fasilitasi, pengawasan, sekretariat, Palembang
Pembimbing**



Junaidi, S.IP., M.Si

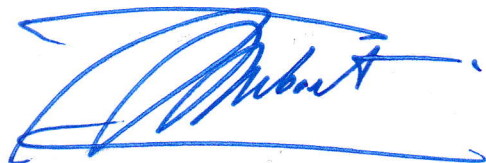
NIP.197603092008011009

Palembang, 10 Juli 2025

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.sos., MPA

NIP.196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of employees in the Facilitation of Implementation and Supervision Division at the Secretariat of Palembang City. Employee performance is a critical factor in determining the effectiveness and efficiency of administrative public services. The research method used is a descriptive approach with the theory of Schullar & Siusan, 1992, data collection techniques through observation, interviews and documentation. The analysis shows that employee performance is influenced by several factors, including competence, discipline, motivation, and the work environment. Overall, employee performance is categorized as fairly good; however, there are still areas that need improvement, particularly in task completion speed and inter-unit coordination. This study recommends regular training, enhanced performance evaluation systems, and the creation of a more supportive work environment to continuously improve employee performance.

Keywords: *employee performance, facilitation, supervision, secretariat, Palembang*

Advisor



Junaidi, S.IP., M.Si

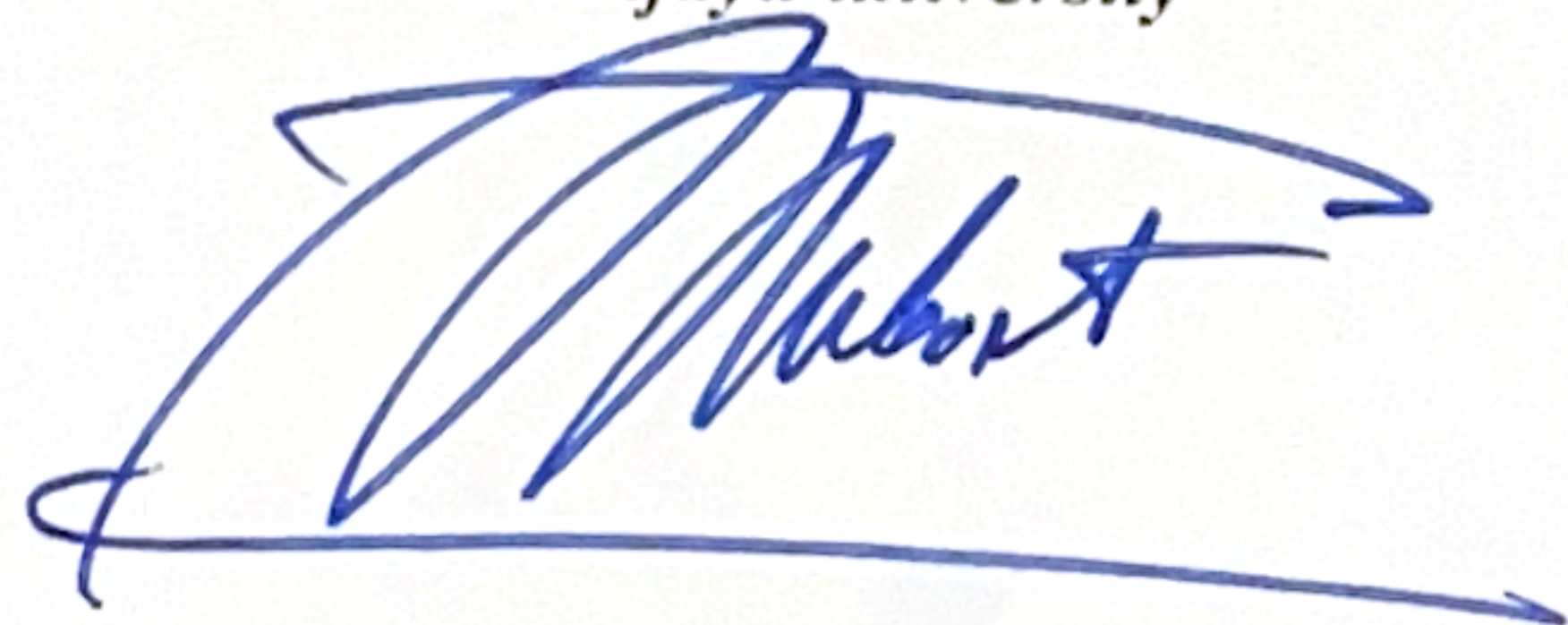
NIP.197603092008011009

Palembang, 10 July 2025

Head of public Administration Department

Faculty of social and political science

Sriwijaya university



Dr. M Nur Budiyanto, S.sos., MPA

NIP.196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Analisis kinerja pegawai bagian fasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan pada sekretariat kota Palembang**". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat pada kurikulum Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini membantu masa perkuliahan dan penyelesaian Skripsi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Belahan Jiwaku, ayahanda Septa Indira (ALM) dan ibunda Rita Sari tercinta yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, terimakasih atas dukungan penuh hingga doa yang tak putus sampai detik ini.
2. kakek nenekku tersayang yang sudah menjadi support terbaik dalam proses penyelesaian program studi sarjana.
3. Adik adikku tercinta yang menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang.
4. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya,yusril trieza mahendra yang selalu menemani suka maupun duka dan memberikan motivasi dari awal perjuangan dalam penulisan skripsi menempuh sarjana ini. Terimakasih sudah meyakinkan penulis agar bisa menyelesaikan skripsi dengan selesai.
5. Bapak Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Ibu Hoirun Nisyak, S. Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Andries Lionardo, M. Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M. Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.

10. Bapak Junaidi, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi. Terima kasih sudah membimbing dan memberikan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
12. Kepada Seluruh Pegawai Sekretariat DPRD Kota Palembang, Terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
13. Teman Seperjuangan sekaligus Sahabat. Anggi, Cendana, Nanta, dan kak adzra Terimakasih sudah berjuang bersama-sama.
14. kepada sahabat tercinta natasya natania yang memberi semangat kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Terakhir, banyak terimakasih kepada diri sendiri Fitria Amanda. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha, mengendalikan dan merayakan dirimu sendiri, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, tapi selalu mencoba dan mengusahakan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Palembang, 10 juli 2025

Fitria Amanda
NIM. 07011382126247

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISTILAH SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Administrasi Publik.....	20
2.1.2 Kinerja.....	21
2.1.3 Indikator Kinerja	22
2.1.4 Pengawasan	23
2.1.5 Fasilitasi Pegawai.....	24
2.2 Penelitian Terlebih Dahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Definisi konsep	38
3.3 Fokus Penelitian.....	39

3.4 Jenis dan sumber data	39
3.5 Informan penelitian	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	42
3.8 Teknik Keabsahan Data	43
3.9 Jadwal Penelitian	43
3.10 Sistematika Penulisan	44
BAB IV HASIL DAN PEMBATASAN.....	46
4.1 Deskripsi Sekretariat DPRD Kota Palembang.....	46
4.1.1 Sarana dan Prasarana Sekretariat Kota Palembang.....	48
4.1.2 Tugas dan Fungsi	52
4.2 Informan Penelitian.....	55
4.3 Hasil Penelitian	55
4.3.1 Kuantitas	56
4.3.2 Kualitas	63
4.3.3 Ketepatan Waktu	69
4.4 Pembahasan.....	81
4.4.1 Kuantitas	81
4.4.2 Kualitas	83
4.4.3 Ketepatan Waktu	85
4.4.4 Kerja Sama	87
4.4.5 Sikap.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Dosen Pembimbing Skripsi	96
Lampiran 2 Kartu Bimbingan Proposal Penelitian	97
Lampiran 3 Lembar Revisi Seminar Proposal	98
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	99
Lampiran 5 Lembar Perbaikan Skripsi	100
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian di Kantor DPRD Kota Palembang	101
Lampiran 7 Pedoman Wawancara	102
Lampiran 8 Matriks Hasil Wawancara	104
Lampiran 9 Siluet	120
Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	7
Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja	8
Tabel 1. 3 Realisasi Anggaran Tahun 2023	10
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	39
Tabel 4. 1 Sarana Prasarana	50
Tabel 4. 2 Informan Penelitian	55
Tabel 4. 3 Rekap Hasil dan Temuan Penelitian.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli	54
Gambar 4. 2 Sarana Kinerja Pegawai	82
Gambar 4. 3 Dokumentasi Hasil Observasi Lapangan	83
Gambar 4. 4 Dokumentasi pengerjaan Perda	84

DAFTAR ISTILAH SINGKATAN

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SEKWAN	: Sekretariat Dewan
Perda	: Peraturan Daerah
SDGS	: Sustainable Development Goals
Ka.Bag`	: Kepala Bagian
CR	: Current Ratio
DER	: Debt to Equity Ratio
TATO	: Total Asset Turnover
NPM	: Net Profit Margin
ROA	: Return on Assets
EPS	: Earnings Per Share
PER	: Price to Earnings Ratio
Tupoksi	: Tugas Pokok dan Fungsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara yang kedaulatannya ada ditangan rakyat, dimana hal ini memberikan makna bahwa dalam pelaksanaan suatu negara menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Menurut konstitusi sendiri keberadaan Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan lembaga pemerintahan yang keduanya sendiri disahkan oleh negara.

Kedudukan kerja yang setara tidak hanya memiliki makna kesetaraan dalam hal otoritas namun semesitinya juga setara dalam bentuk hal tanggung jawab serta kapasitas dalam memastikan suatu proses pemerintahan serta pembangunan berjalan dengan baik. Mereka tidak saling mengontrol, hal ini tercermin dengan ditetapkannya pedoman daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Kedudukannya merupakan unsur penganggaran pemerintahan daerah, posisi DPRD dalam suatu pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yaitu legislasi, anggaran, serta pengawasan. Legislasi ialah merancang kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya suatu pelayanan publik yang baik serta sesuai pada standar. Sedangkan fungsi *budgeting* atau anggaran ialah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sudah sesuai atau tepat sasaran, efisien baik pada segi jumlah maupun segi waktu. Pengawasan sendiri ialah suatu fungsi yang bertujuan melakukan monitor serta evaluasi dalam pelaksanaan peraturan

daerah dan penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan peran serta fungsi tersebut DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang mana hal ini tertuang pada UU No. 23 Tahun 2014 yang membahas mengenai Pemerintahan daerah, Pasal 209 yang menjelaskan bahwa salah satu lembaga daerah pendukung DPRD ialah Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD atau yang sering dikenal sebagai Sekretariat Dewan ialah suatu organisasi besar dan kompleks yang membantu anggota Dewan agar tidak bekerja sendiri. Dikutip dari (Tarigan & Ginting, 2020) Anggota Dewan dalam halnya DPRD harus didukung pihak lain yang dalam hal ini merupakan Sekretariat Dewan yang memiliki keterampilan serta keahlian yang tidak dapat ditandingi oleh perwakilan nasional dalam hal teknis praktis yang dimiliki, hal ini tentunya sangat baik dalam mencapai tujuannya secara maksimal. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang membahas terkait Organisasi Daerah, pada Pasal 31 yang mengatur bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan dan keuangan serta menyediakan tenaga profesional yang diperlukan dalam mendukung, menyediakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD .

Selain itu hal ini juga ditegaskan pada Pasal 67 pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang membahas tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pengelola Rencana Kerja DPRD dalam Bentuk Program atau Daftar Kegiatan TA Pimpinan DPRD akan menyampaikan rencana kerja DPRD pada Sekretaris DPRD untuk disetujui. Lalu hasil pemungutan suara rencana kerja DPRD akan disampaikan pada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.

Dari peraturan pemerintah tersebut, peran kunci Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD terlihat sangat jelas (Indartini et. al., 2019). Keberadaan Sekretariat Dewan merupakan bagian integral dari pemerinth baik kabupaten maupun kota yang keberadaanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan apabila membicarakan kinerja DPRD (Rizka Hidayanti, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 215 ayat (1), (2) dan ayat (3), sekretariat DPRD Kabupaten atau Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten atau Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten atau Kota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dengan posisi yang penting di dalam proses penganggaran Pemerintah Daerah, sekretaris DPRD sebagai bagian dari aparatur sipil negara perlu memiliki kepekaan politik dan profesional dalam mendukung hubungan kerja Pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat.

Siagian (2008) menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan memiliki fungsi administratif yang sangat penting, yaitu mendukung DPRD agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan efektif dan efisien. Ia menekankan bahwa administrasi yang baik merupakan tulang punggung bagi keberhasilan sebuah organisasi. Sekretariat Dewan sebagai pejabat struktural bertanggung jawab dalam mendukung penganggaran fungsi DPRD, termasuk pengelolaan dokumen resmi,

pengaturan sidang, dan fasilitasi komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Peran ini memastikan bahwa hubungan antar lembaga dapat berjalan harmonis (Widjaja, 2002). Sedangkan Moenir (1995) menggaris bawahi pentingnya pelayanan prima dari Sekwan untuk mendukung kelancaran tugas DPRD. Menurutnya, pelayanan administratif yang baik mencerminkan kinerja organisasi pemerintah Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Adapun Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi yaitu penganggaran administrasi kesekretariatan DPRD, penganggaran administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penganggaran rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya. Sekretariat DPRD terdiri dari Bagian umum, bagian hukum dan persidangan, bagian keuangan, dan bagian fasilitasi tugas fungsi pengawasan dan penganggaran. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi Bagian fasilitasi tugas fungsi pengawasan dan penganggaran. Fungsi pengawasan dapat dilaksanakan melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. yang profesional dan akuntabel.

Maka berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Sekretariat Dewan dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan yang profesional dan berkualitas dalam mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi masyarakat. Melihat kedudukan, tugas, dan fungsi dari Sekretariat Dewan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Dewan memiliki peranan yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD, yang artinya bahwa efektifitas dalam pelaksanaan dan fungsi sekretariat dewan dapat menjadi penentu terkait efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten ataupun kota di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokrasi di daerah, sebagaimana terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945 dan penjabarannya lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga politik yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam hal mewujudkan *Sustainability Development Goals* (SDGS) tentunya keberadaan DPRD juga menjadi salah satu penunjang dalam mewujudkan salah satu dari indikatornya yaitu pada point ke 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh. *Sustainability Development Goals* (SDGS) merupakan salah satu agenda Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda internasional yang sudah dimulai pada tahun 2015. *Sustainability Development Goals* (SDGs) dipelopori oleh

perserikatan bangsa bangsa (PBB) (Irawan et al., 2021). Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Kota Palembang memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi SDGS pada Panca Upaya Utama Pembangunan Kota Palembang Tahun 2024-2026.

Peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah bertugas dalam membuat peraturan daerah (Perda), mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan SDGS 16 yang mendorong keberadaan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Kaitan Indikator pada poin 16 ialah meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi lembaga di semua tingkat serta Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif. Hal ini dapat dilihat Melalui fungsi pengawasan DPRD, kebijakan yang diskriminatif atau tidak berpihak pada masyarakat rentan dapat dikritisi dan diperbaiki. Tentunya untuk mewujudkan peran serta fungsi DPRD hal yang perlu diperhatikan salah satunya ialah kinerja pegawainya.

Kinerja pegawai di sektor publik, baik pada level nasional, lokal, maupun daerah, merupakan aspek krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, terdapat berbagai isu yang memengaruhi pola kerja pegawai sektor publik di berbagai tingkatan, yang kemudian berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pegawai adalah suatu proses yang dikerjakan seseorang dalam menyelesaikan suatu kegiatan sesuai dengan bidang yang dikerjakannya. Kinerja dapat diartikan pencapaian sebuah tugas, dimana pegawai dalam bekerja sesuai dengan program kerja organisasi. Dalam permasalahan untuk mendorong kinerja pegawai yang optimal instansi dapat melihat dari segi

kompetensi pegawai. Adapun lima aspek dalam menilai kinerja pegawai yang dikemukakan oleh T.R Mitchell yaitu kualitas kerja (Quality of work), Ketepatan waktu (Promptnes), Inisiatif (Initiative), Kapabilitas (Capability), Komunikasi (Communication) .

Dalam hal Sekretariat DPRD Kota Palembang merupakan perangkat daerah Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris DPRD Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang, dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Palembang. Dikutip dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2024-2026 pada tahun 2022 jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kota Palembang sebanyak 56 orang Pegawai ASN dan 70 orang pegawai Non ASN adapun komposisi yang dikelompokkan jenjang pendidikan dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	25
2.	S1	26
3.	D3	1
4.	SMA	4
5.	SMP	-
Jumlah		56

Sumber: Data Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2024-2026

Dikutip dari Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2024 Sasaran kinerja sekretariat DPRD Kota Palembang sendiri ada dua yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan meningkatnya pelayanan terhadap DPRD sesuai SOP. Berikut merupakan capaian indikator kinerja utama tahun 2023 Sekretariat Utama Tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja

No .	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Tahun	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	% Nilai SAKIP	100%	100%	100%	100.00	Persentase keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periode
2.	Meningkatnya pelayanan terhadap DPRD sesuai SOP	Indeks kepuasan	100%	100%	100%	83.6	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

Sumber: Data Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun realisasi anggaran tahun 2023 telah menunjukkan pencapaian yang mendekati target, masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi kinerja sekretariat DPRD guna untuk meningkatkan efisiensi kinerja ke depan.

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023	%
A.	BELANJA Daerah	118.721.951.871,-	105.663.594.407,50	89,00
1.	Belanja Operasi	103.802.382.673,-	91.284.321.624,-	87,91
	- Belanja Pegawai	43.805.020.362,-	39.677.550.281,-	90,58
	- Belanja Barang dan Jasa	59.997.362.311,-	51.606.771.343,-	85,96
2.	Belanja Modal	14.919.569.198,-	14.410.438.784,-	96,59
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.861.839.198,-	13.359.108.350,-	96,37
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.057.730.000,-	1.051.330.434,-	99,39
	Surplus defisit	(118.721.951.871,-)	(105.694.760.408,-)	89,03

Sumber: Data Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun

2023

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan realisasi anggaran kinerja tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan beberapa pos anggaran yang berhasil dialokasikan secara optimal untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan atau pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Palembang yaitu indikator kinerja sama dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan sehingga indikator

tersebut dapat direalisasikan dan antara kegiatan dengan indikator kinerja sesuai dengan target renstra. Selain faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, ada pula beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap belum berhasilnya pelayanan, yakni terdapat perbedaan indikator kegiatan, pemuatan beberapa kegiatan dalam renstra perangkat daerah belum sesuai dengan kerangka pendanaan dalam APBD, indikator dan target. Dari realisasi anggaran tersebut terlihat bahwa masih diperlukannya penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kota Palembang baik secara kuantitas maupun kualitas demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Palembang di masa mendatang.

Dikutip dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2024-2026 serta pra observasi yang dilakukan peneliti bahwa adanya akar masalah yang menjadi penghambat dari pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Palembang yaitu masih banyaknya persoalan pembangunan yang harus diselesaikan. Adanya program serta kegiatan yang dilaksanakan masih belum sejalan dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja, sehingga hakikatnya tujuan tersebut masih belum optimal. Ketidakoptimalan ini untuk meminimalisir seefisien mungkin untuk program serta kegiatan pada periode mendatang yang nantinya apabila sesuai dengan tujuan maka akan memberikan dampak pada penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi.

Analisis kinerja pegawai merupakan salah satu alat manajerial yang penting dalam mengelola sumber daya manusia di suatu organisasi atau perusahaan. Kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja individu atau kelompok pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja pegawai yang baik tidak hanya mencerminkan produktivitas yang tinggi, tetapi juga mencakup aspek lain seperti

efisiensi, kualitas pekerjaan, serta kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, analisis kinerja pegawai berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan perkembangan organisasi. Analisis kinerja merujuk pada proses evaluasi dan pengukuran sejauh mana suatu organisasi, sistem, atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini penting untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan hasil dari aktivitas yang telah dilaksanakan. Dalam konteks organisasi, analisis kinerja bertujuan untuk menilai apakah sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kinerja pegawai yang baik tidak hanya mencerminkan produktivitas yang tinggi, tetapi juga mencakup aspek lain seperti efisiensi, kualitas pekerjaan, serta kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, analisis kinerja pegawai berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan perkembangan organisasi. Analisis kinerja merujuk pada proses evaluasi dan pengukuran sejauh mana suatu organisasi, sistem, atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini penting untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan hasil dari aktivitas yang telah dilaksanakan. Dalam konteks organisasi, analisis kinerja bertujuan untuk menilai apakah sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, analisis kinerja pegawai yang mendukung fasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting. Pegawai yang bertugas dalam fasilitasi DPRD memiliki peran krusial dalam mendukung kelancaran fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan oleh DPRD. Mereka bertanggung jawab atas administrasi, logistik, serta komunikasi antara anggota DPRD dan pihak-pihak terkait lainnya.

Namun, seringkali terdapat tantangan dalam memastikan bahwa kinerja pegawai fasilitasi ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tantangan ini meliputi beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya, hingga kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Dengan analisis kinerja yang komprehensif, dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pegawai fasilitasi DPRD memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil analisis ini akan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Sekretariat DPRD Kota Palembang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seharusnya pegawai sekretaria DPRD Kota Palembang mampu menunjukkan kinerja yang optimal sehingga tugas dan fungsi DPRD akan berjalan secara optimal juga baik pelaksanaan fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran maupun fungsi pengawasan.

Salah satu bagian dari Sekretariat DPRD Kota Palembang adalah Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Adapun Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dibidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Kinerja pegawai dalam menjalankan fungsi fasilitasi sangat menentukan efektivitas penganggaran tugas pengawasan oleh anggota DPRD (Rachman, 2021). Upaya peningkatan kualitas layanan pada bagian ini sangat penting dilakukan agar Fungsi fasilitasi tersebut bisa berjalan secara efektif yang meliputi penyediaan dukungan administratif, teknis, dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut. Oleh karena itu adalah Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal agar fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Namun, terdapat indikasi bahwa peran pegawai di Sekretariat DPRD belum sepenuhnya optimal, ditunjukkan oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan khusus, dan kendala komunikasi antar lembaga (Surya, 2022).

Berdasarkan hasil observasi pada bagian Fasilitasi adalah Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kota Palembang, ada beberapa masalah yang dijumpai pada pelaksanaan tugas fungsinya antara lain :

Masalah pertama yaitu kuantitas kinerja. Kuantitas kinerja yang terdapat di DPRD Kota Palembang jumlah pekerjaan yang diselesaikan pegawai dengan kurun waktu tertentu sedangkan dengan waktu ditetapkan pegawai belum menyelesaikan pekerjaan jadi pekerjaan semakin menumpuk. Berikut hasil wawancara dengan kepala bidang bagian fasilitasi DPRD kota Palembang :

“Untuk masalah kuantitas pekerjaan memang masih sering sedikit terkendala karna jumlah pekerjaan yang diselesaikan pegawai dalam

kurun waktu tertentu, Pegawai sering kali dihadapkan pada volume pekerjaan yang tinggi sedangkan jumlah pegawai terbatas, Terutama saat adanya sidang sidang penting”. (wawancara pada 17 februari 2025, Bapak Desthriansyah)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti untuk kuantitas pekerjaan dapat disimpulkan bahwa jumlah pekerjaan yang banyak tetapi jumlah pegawai terbatas sehingga munculnya masalah pekerjaan ada yang terbengkalai karna pekerjaan menumpuk tetapi jumlah pegawai sangat sedikit.

Masalah kedua yaitu kualitas pekerjaan. Masalah kualitas pekerjaan yang ada di DPRD Palembang kualitas kinerja masih sangat sangat minim karna dilihat jarang adanya pekerjaan jadi pegawai datang ke kantor hanya beberapa jam sedangkan waktu yang semestinya tidak seperti itu. Berikut hasil wawancara sama orang yang sama yaitu (Bapak Desthriansyah, pada 17 februari 2025)

“iya disini memang lumayan santai karna jarang ada pekerjaan jadi kadang datang hanya sebentar untuk absen sebentar karna kerjaan menumpuk hanya ada di waktu tertentu seperti sidang sidang atau ada kunjungan kerja” (wawancara 17 februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti untuk masalah kualitas pekerjaan Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap mutu pekerjaan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan itu kurang terlaksana seperti jam kerja yang ditetapkan seharusnya jam 8 pagi – 4 sore sedangkan ada sebagian pegawai datang hanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 orang.

Masalah ketiga yaitu ketepatan waktu. Masalah ketepatan waktu yang ada di DPRD Kota Palembang masalah pada penyelesaian tugas tugas tertentu karna seperti yang kita ketahui berkaitan dengan masalah kualitas pekerjaan karna pegawai hanya beberapa jam berada di kantor jadi banyaknya tugas tugas yang terbengkalai. Berikut hasil wawancara dengan bapak desthriansyah

“untuk jangka waktu penyelesaian tugas tugas memang ada tenggat waktu yang disediakan tetapi kadang masih banyak pegawai yang masih belum menyelesaikan tugasnya”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan untuk ketepatan waktu yang tidak sesuai dengan standar ketentuan. Ketepatan waktu merupakan aspek krusial dalam analisis kinerja pegawai fasilitasi DPRD. Ketepatan waktu merujuk pada kemampuan pegawai untuk menyelesaikan tugas tugas mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dalam konteks fasilitasi DPRD, dimana agenda dan keputusan sering kali memiliki batas waktu sangat mempengaruhi aktivitas operasional.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis kinerja pegawai yang akan dijadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian misalnya (Hadriansyah et al., 2021) Meneliti “Peranan pegawai sub bagian fasilitasi penganggaran pengawasan sekretariat DPRD kabupaten Tanah kumbua” dapat mengetahui bagaimana prosedur pelaksana fungsi sub bagian fasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan, hasil dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja (Kusumawardani, et al., 2024). Peranan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo yang terdiri dari tugas utama, pola perilaku, bagian suatu fungsi dan hubungan sebab akibat dalam pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD (S. Prasetyo & Pramono, 2024) Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam pengawasan kebijakan daerah studi kasus kantor DPRD Kabupaten Buton menunjukkan bahwa fungsi DPRD pada proses pengawasan kebijakan daerah melalui proses diantaranya yaitu penyusunan anggaran dan belanja daerah (Veronika & Yustinus 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya, dengan menyoroti aspek produktifitas, responsibilitas dan akuntabilitas,. Peran DPRD sebagai lembaga legislatif sangat penting dalam menggerakkan pembangunan daerah, terutama dalam menghasilkan

kebijakan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat memfasilitasi aspirasi masyarakat di kota banjar (Maharani, et al., 2023)

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi tujuan penulis untuk mengangkat tema “Analisis Kinerja Pegawai Bagian Fasilitasi Penyelenggaraan Dan Pengawasan Pada Sekretariat DPRD Kota Palembang” adalah dari penelitian ini berfokus pada peranan kinerja pegawai fasilitasi dalam mendukung penganggaran pengawasan di Sekretariat DPRD Kota Palembang untuk menganalisis bagaimana peran kinerja pegawai dalam menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya bagaimana kinerja pegawai fasilitasi pada penganggaran pengawasan Sekretariat DPRD Kota Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja pegawai fasilitasi pada penganggaran Pengawasan Sekretariat DPRD kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian analisis kinerja pegawai memberikan manfaat yang luas bagi mahasiswa dan pegawai itu sendiri. Bagi pegawai DPRD kota Palembang, hasil dari penelitian ini meningkatkan kinerja kerja. Secara keseluruhan, analisis kinerja pegawai yang dilakukan secara objektif dan sistematis dapat berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang organisasi, baik dalam hal operasional, keuangan, maupun pengelolaan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Hedy Vanni. Abdulrahim Maruwae, dkk. 2022. Pengaruh Pendidikan Formal Dan Diklat Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6), 4294-4299. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8936>.
- Ambarita, Dian Fitri. Putri Hardianti Hasibuan, dkk. 2020. Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Rayateh Utama Teladan Canggih Medan. JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA, 4(3), 906-923. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss3.pp906-923>.
- Dunggio, Swastiani. 2020. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Dungingi Kota Gorontalo. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 7(1), 1-9, <https://doi.org/10.37606/publik.v7i1.114>.
- Fauzi, Ahmad. 2020. Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Manajemen dan Perbankan, 7(2), 45-60. <https://doi.org/10.55963/jumpa.v7i2.355>.
- Firmansyah, Alif. M. Nakula Anjani Putra S, dkk. 2024. Analisis Kinerja Keuangan PT. Pertamina (Persero) Tahun 2020-2022. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial, 7(2), 10-16. <https://doi.org/10.56071/jemes.v7i2.864>.
- Hadriansyah. Irwanto, dkk. 2021. Peranan Pegawai Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen, 5(2), 109-131.

<https://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus/article/view/179>.

Hanafi, Irma Halima. 2024. Tanggung jawab Negara dalam Pengawasan Terhadap Operator Penerbangan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 498-520. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.498-520>.

Ibrahim, Fadli Erwan. Fatkhurahman & Donal Devi Amdanata. 2023. Pengaruh Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau Dengan Disiplin Kerja Sebagai Intervening. *Jurnal Komunitas Sains Manajemen*, 2(1), 95-106. <https://doi.org/10.55356/jksm.v2i1.87>.

Indartini, Mintarti. Nurharibnu Wibisono & Assistriadi Widjisenno. (2019). Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Solo: Penerbit Taujih.

Irawan, Bambang. Paisal Akbar, dkk. 2021. Perencanaan pembangunan untuk percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah otonomi baru. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 34(2), 184-195. <https://doi.org/10.20473/mkp.V34I22021>.

Kusumawardani, Vivi Pancasari. Meiske Claudia. 2024. Analisis Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kultur Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Bank Kalteng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(1), 29-37. <https://doi.org/10.33084/neraca.v10i1.7259>.

Machali, Imam. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Maharani, Nita Ospia, Dini Yulianti & Arie Budiawan. 2023. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Memfasilitasi Aspirasi Masyarakat di Kota Banjar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(2), 600-611. <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i2.10844>.
- Marnisah, Luis. Jefirstson Richset Riwu Kore & Fellyanus Haba Ora. Employee Performance Based On Competency, Career Development, And Organizational Culture. *Journal Of Applied Management*, 20(3), 632-650. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2022.020.03.13>.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 67 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pengelola.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Daerah.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Palembang.
- Prasetyo, Sugeng. Sapto Pramono. 2024. Peranan Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Soetomo Magister Ilmu Adminitrasi*, 2(1), 115-120. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/8105>.
- Pratama, Nicolas Irman & Muhammad Azhari. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pada Usaha Rintisan (Studi Pada Kedai Kopi Koala Periode November 2018 – Februari 2020). *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 4(8), 1146-1159. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i8.441>.

- Putra, Maharidiawan. 2019. Sekretariat DPRD Perekat Hubungan Kerja Kepala Daerah Dan DPRD Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 73-77. <https://doi.org/10.52947/morality.v5i1.108>.
- Renstra Sekretariat DPRD Kota Palembang Tahun 2024-2026
- Richset Riwukore, J., Susanto, Y., Walyusman, W., Riance, A., Zubaidah, R. A., & Habaora, F. (2021). Analysis of Employee Performance Based on Competence and Work Climate in Lubuklinggau Barat I District at Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research*, 71, 7–14. <https://doi.org/10.32861/jssr.71.7.14>.
- Tarigan, Meliasta Hapri. Arwanto Harimas Ginting. 2020. Model Organisasi Sekretariat Dewan dalam Mendukung Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Provinsi Lampung. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 5(1), 51-66. <http://dx.doi.org/10.33701/j-3p.v5i1.1003>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 215, ayat (1), (2), dan (3).
- Warsono, Hardi. Retno Sunu Astuti & Aufarul Marom. (2019). Buku Ajar Teori Administrasi. Departemen Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.